Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora (2025) 3:1, 1-15
ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/nusantara.xxxxxxx
Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
Tersedia online Pada Bulan Juni 2025.

Rokonstruksi Identitas Di Era Globalisasi

Syamsi Raja Raihan Maskub; Naaila Maulidina Putri Damanik; Muhammad Rakha Kenza; Joy Gracia Gain Andra Napitupulu, Universitas Trisakti. sraihanmaskub@gmail.com

ABSTRACT: This article discusses how the identity of Indonesian citizenship is reconstructed amid the rapid pace of globalization. The focus is on changes in values, attitudes, and practices of Indonesian citizens in responding to global challenges such as information openness, international mobility, and cultural dominance. The study uses a qualitative descriptive approach with literature review as the primary source. The results show that the reconstruction is carried out through revitalization of Pancasila values, strengthening of civic education, and formation of a national identity that is adaptive but rooted in local culture.

Keywords: Identity, Citizenship, Globalization, Pancasila, Education.

ABSTRAK: Artikel ini membahas bagaimana identitas kewarganegaraan Indonesia direkonstruksi di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Fokus utama adalah pada perubahan nilai, sikap, dan praktik warga negara Indonesia dalam menyikapi tantangan global, seperti keterbukaan informasi, mobilitas internasional, dan dominasi budaya asing. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur sebagai sumber utama. Hasil menunjukkan bahwa rekonstruksi identitas dilakukan melalui revitalisasi nilai-nilai Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan pembentukan jati diri bangsa yang adaptif namun tetap berakar pada budaya lokal.

Kata Kunci: identitas, kewarganegaraan, globalisasi, Pancasila, pendidikan

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal identitas kewarganegaraan. Proses globalisasi membuka batas-batas negara melalui kemajuan teknologi informasi, arus migrasi, pertukaran budaya, dan liberalisasi ekonomi. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan merekonstruksi identitas kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai- nilai nasional.

Identitas kewarganegaraan Indonesia yang selama ini dibangun berdasarkan semangat kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat persatuan, kini dihadapkan pada pengaruh nilai-nilai global yang seringkali tidak sejalan dengan budaya lokal. Generasi muda, sebagai bagian terbesar dari populasi, menjadi kelompok yang paling rentan mengalami pergeseran identitas akibat derasnya arus informasi dan budaya luar yang masuk tanpa filter.

Di sisi lain, globalisasi juga menawarkan peluang bagi Indonesia untuk menunjukkan identitas kewarganegaraannya dalam konteks yang lebih luas. Rekonstruksi identitas bukan berarti meninggalkan akar budaya dan nasionalisme, melainkan menyesuaikan diri secara dinamis dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Oleh karena itu, penting untuk menelaah kembali bagaimana proses pembentukan dan pemeliharaan identitas kewarganegaraan Indonesia di era globalisasi ini dilakukan, baik melalui

pendidikan, kebijakan publik, maupun peran masyarakat sipil.

Dengan mengkaji rekonstruksi identitas kewarganegaraan di era globalisasi, diharapkan dapat ditemukan formula yang mampu menguatkan karakter warga negara Indonesia agar tetap memiliki

rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap bangsa, dan tangguh menghadapi perubahan dunia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terkait isu identitas kewarganegaraan dan globalisasi. Analisis data dilakukan secara interpretatif dengan mengaitkan fenomena rekonstruksi identitas kewarganegaraan Indonesia terhadap dinamika sosial, budaya, dan politik dalam konteks global. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana negara dan masyarakat merespons tantangan globalisasi terhadap nilai-nilai kewarganegaraan.

1. Pendekatan Kualitatif dalam Studi Identitas Kewarganegaraan

Metode kualitatif berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial dari perspektif subjek yang mengalaminya (Creswell, 2014). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasi bagaimana warga negara Indonesia—terutama generasi muda—memahami, merasakan, dan merespons perubahan identitas yang terjadi akibat arus globalisasi. Fenomena identitas tidak dapat diukur secara kuantitatif karena bersifat subjektif, dinamis, dan kontekstual, sehingga eksplorasi mendalam diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang utuh.

Patton (2002) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyelami kompleksitas pengalaman manusia dan mengaitkannya dengan konteks sosial-budaya yang melatarbelakangi. Oleh karena itu, metode ini sangat relevan dalam memahami dinamika rekonstruksi identitas yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

2. Studi Pustaka sebagai Metode Utama

Metode studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, maupun publikasi institusi yang kredibel. Studi pustaka tidak hanya memberikan kerangka teoretis, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan berbagai perspektif dan pendekatan dalam memahami identitas kewarganegaraan dalam era globalisasi.

Menurut Zed (2008), studi pustaka sangat penting dalam penelitian sosial-humaniora karena mampu menyediakan wawasan historis, pemikiran kritis, dan sintesis dari berbagai sumber ilmiah. Dalam penelitian ini, literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis, dan kontribusinya dalam mendiskusikan isu-isu identitas, kewarganegaraan, dan globalisasi.

Literatur utama yang digunakan mencakup teori identitas dari Stuart Hall (1996), konsep kewarganegaraan dari Turner (2001), serta gagasan tentang glokalisasi dari Robertson (1995). Ketiga tokoh ini memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dinamika identitas dalam konteks perubahan global.

3. Teknik Pengumpulan dan Seleksi Data

Proses pengumpulan data pustaka dilakukan melalui tiga tahap:

- Identifikasi: Menyusun daftar literatur yang relevan dari katalog perpustakaan universitas, database jurnal elektronik (Scopus, JSTOR, Google Scholar), dan penerbit akademik.
- Seleksi: Memilih sumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu identitas, kewarganegaraan, pendidikan, budaya lokal, dan globalisasi. Kriteria seleksi meliputi tahun publikasi (diutamakan 20 tahun terakhir), kredibilitas sumber, serta kejelasan dan kedalaman argumen.

- Klasifikasi: Literatur dikelompokkan berdasarkan tema utama, seperti teori identitas, dinamika globalisasi, pendidikan kewarganegaraan, dan nasionalisme.

Dokumen kebijakan seperti Kurikulum 2013, RPJMN, dan dokumen dari Kemendikbudristek juga dianalisis untuk melihat bagaimana negara merespons isu rekonstruksi identitas dalam praktik pendidikan dan kebijakan publik.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interpretatif dan tematik, dengan langkah-langkah berikut:

- Reduksi data: Mengidentifikasi informasi penting dari literatur, lalu menyaring bagian yang tidak relevan.
- Koding terbuka dan tematik: Mengklasifikasikan data berdasarkan tema seperti "nilai Pancasila", "globalisasi dan budaya", "pendidikan kewarganegaraan", dan "identitas nasional".
- Sintesis konsep: Menggabungkan data yang telah diklasifikasikan untuk merumuskan kesimpulan dan kerangka pemahaman baru.

Model analisis ini mengikuti kerangka dari Braun & Clarke (2006), yang memungkinkan penggalian makna mendalam melalui pola-pola tematik dari berbagai sumber literatur.

5. Validitas dan Kredibilitas

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber yang memiliki perspektif berbeda terhadap isu yang sama. Selain itu, dilakukan juga pemeriksaan sejawat dengan mengundang dosen pembimbing dan rekan peneliti untuk mereview kerangka berpikir dan sintesis hasil penelitian.

Miles & Huberman (1994) menyarankan bahwa keandalan dalam studi kualitatif diperoleh melalui konfirmasi silang dan keterbukaan dalam penyajian data, sehingga pembaca dapat menilai keabsahan temuan berdasarkan transparansi proses penelitian.

6. Kerangka Teoretis

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori utama sebagai kerangka analisis:

- Teori Identitas Sosial (Tajfel & Turner, 1986): Menjelaskan bagaimana individu membentuk identitasnya berdasarkan kelompok sosial dan simbol-simbol nasional.
- Teori Representasi Budaya (Hall, 1996): Menyatakan bahwa identitas dibentuk melalui representasi simbolik yang terus berubah tergantung konteks sejarah, politik, dan budaya.

Glokalisasi (Robertson, 1995): Konsep penggabungan antara nilai-nilai global dan lokal, yang sangat relevan dalam melihat cara bangsa Indonesia menyesuaikan identitasnya di tengah tekanan global.

Kewarganegaraan Kritis (Giroux, 1989): Menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang mampu membentuk warga negara yang kritis, reflektif, dan aktif dalam proses demokrasi.

Melalui teori-teori ini, rekonstruksi identitas kewarganegaraan dipahami sebagai proses aktif yang melibatkan aktor-aktor negara, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil dalam membentuk ulang makna kebangsaan yang sesuai dengan tuntutan zaman..

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pergeseran Identitas Kewarganegaraan Indonesia dalam Arus Globalisasi

Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam pembentukan dan

penghayatan identitas kewarganegaraan. Di Indonesia, identitas kewarganegaraan yang dulunya terikat kuat pada nilai-nilai lokal, budaya nasional, dan simbol-simbol negara, kini mengalami pergeseran signifikan akibat interaksi intens dengan budaya global. Generasi muda Indonesia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh ini karena keterlibatan aktif mereka dalam teknologi digital, media sosial, dan budaya populer internasional.

Fenomena seperti meningkatnya konsumsi konten asing, gaya hidup individualistik, dan kecenderungan imitasi terhadap budaya luar menciptakan apa yang disebut identitas hibrid, yaitu identitas yang merupakan hasil percampuran antara nilai lokal dan nilai global. Identitas hibrid bukanlah semata-mata bentuk penyatuan harmonis, melainkan juga berpotensi menciptakan ketegangan antara loyalitas terhadap budaya nasional dengan daya tarik budaya global yang dianggap lebih modern dan bebas. Generasi muda kini lebih mengenal budaya Korea Selatan, tren Barat, atau gaya hidup urban global dibandingkan tokoh-tokoh nasional, tradisi daerah, atau nilai-nilai asli Pancasila.

Dampak dari pergeseran ini adalah menurunnya rasa nasionalisme, melemahnya solidaritas sosial, dan munculnya krisis identitas yang membuat sebagian individu merasa asing terhadap bangsanya sendiri. Identitas kewarganegaraan menjadi kabur, tidak hanya karena pengaruh eksternal, tetapi juga karena kurangnya penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mengarahkan kembali pembentukan identitas kewarganegaraan yang sesuai dengan nilai-nilai nasional namun tetap adaptif terhadap tantangan global.

B. Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Identitas Nasional

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki peran sentral dalam membentuk identitas kewarganegaraan Indonesia.

Namun, dalam realitas kontemporer, Pancasila kerap hanya diposisikan sebagai dokumen formal atau simbolis tanpa adanya upaya konkret untuk menginternalisasikannya ke dalam perilaku masyarakat. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keharusan untuk mengembalikan Pancasila sebagai landasan etis dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Revitalisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup dimensi konseptual, struktural, dan kultural. Secara konseptual, pemahaman tentang Pancasila harus diperluas dan dikontekstualisasikan sesuai dengan dinamika sosial dan tantangan zaman. Misalnya, nilai gotong royong perlu diterjemahkan dalam konteks kerja kolaboratif dan solidaritas digital. Nilai keadilan sosial dapat diaktualisasikan dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan keadilan dalam kebijakan publik, pemerataan akses teknologi, dan perlindungan kelompok rentan.

Secara struktural, revitalisasi Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan dan regulasi yang mendukung pembangunan identitas nasional yang kuat. Hal ini mencakup penyusunan kurikulum pendidikan, peraturan perundang-undangan yang menjunjung nilai kemanusiaan, dan penguatan kelembagaan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Sedangkan secara kultural, revitalisasi dilakukan melalui media, seni, budaya populer, dan gaya hidup yang mempromosikan nilai-nilai luhur bangsa secara kreatif dan menarik bagi generasi muda.

Pentingnya revitalisasi ini juga ditegaskan oleh para pemikir pendidikan seperti Wahab dan Lestari (1999:52) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam proses pendidikan adalah kunci pembentukan identitas nasional yang kokoh. Mereka melihat bahwa pendidikan harus menjadi alat transformasi nilai, bukan sekadar penghafalan ideologi. Pendidikan harus mampu menjadikan Pancasila sebagai bagian integral dari kesadaran warga negara dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

C. Peran Strategis Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan menjadi pilar utama dalam pembangunan identitas nasional yang kuat dan adaptif. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran kebangsaan. Tilaar (2004:98) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus membekali peserta didik dengan pemahaman tentang nilai kebangsaan yang kontekstual dan dinamis agar tidak kehilangan akar identitas dalam kehidupan global.

Pendidikan kewarganegaraan harus dirancang untuk menghasilkan warga negara yang aktif, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan keadilan sosial. Hal ini mengharuskan perubahan dalam pendekatan dan strategi pembelajaran yang digunakan di sekolah. Model pembelajaran yang dogmatis dan indoktrinatif harus diganti dengan pendekatan dialogis, kontekstual, dan partisipatif. Peserta didik perlu diajak untuk memahami realitas sosial, menganalisis persoalan kebangsaan, dan terlibat dalam aksi nyata yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Kurikulum pendidikan kewarganegaraan juga harus responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti keberagaman etnis dan agama, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ancaman radikalisme. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya memahami identitasnya sebagai warga negara Indonesia, tetapi juga mampu berperan sebagai warga global yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.

Pendidikan kewarganegaraan juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap jati diri bangsa. Rasa bangga ini tidak dapat dipaksakan melalui retorika, tetapi dibangun melalui pengalaman konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan perlu memperkuat kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan komunitas sebagai ekosistem pendidikan karakter yang komprehensif dan berkelanjutan.

D. Membangun Identitas Kewarganegaraan yang Adaptif: Konsep Glokalisasi

Di tengah kompleksitas globalisasi, pembangunan identitas kewarganegaraan yang adaptif menjadi strategi yang rasional dan realistis. Identitas yang kuat bukan identitas yang eksklusif dan tertutup, melainkan identitas yang mampu berdialog dengan perubahan tanpa kehilangan akar budaya. Dalam konteks ini, konsep glokalisasi menjadi pendekatan yang relevan. Glokalisasi merupakan kombinasi antara globalisasi dan lokalisasi, yaitu proses mengadaptasi unsur global dengan kearifan lokal.

Pembangunan identitas adaptif dapat dimulai dari penguatan budaya lokal yang bersifat universal, seperti semangat gotong royong, toleransi antarumat beragama, dan penghormatan terhadap perbedaan. Nilai-nilai ini dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan sesuai dengan selera generasi muda, seperti melalui film, musik, media sosial, hingga aplikasi digital berbasis edukasi kebangsaan. Strategi ini tidak hanya mempertahankan identitas lokal, tetapi juga memperkenalkannya ke tingkat global sebagai bagian dari diplomasi budaya.

Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini. Dengan keragaman budaya, kekayaan bahasa, dan nilai tradisional yang mendalam, Indonesia dapat menjadi pelaku utama dalam menyuarakan narasi identitas yang inklusif dan humanis di panggung dunia. Oleh karena itu, pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sipil perlu bersama-sama membangun infrastruktur sosial dan budaya yang mendukung proses glokalisasi ini.

Selain itu, penggunaan teknologi lokal dan inovasi berbasis budaya juga perlu dikembangkan sebagai bagian dari strategi membangun identitas yang relevan dengan era digital. Misalnya, pengembangan platform digital untuk pembelajaran nilai-nilai Pancasila, pelestarian budaya lokal melalui arsip digital, dan pemanfaatan media sosial untuk kampanye toleransi dan persatuan. Identitas kewarganegaraan dalam hal ini tidak hanya diwujudkan

melalui simbol dan dokumen resmi, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam ruang digital dan kehidupan sehari-hari.

E. Implikasi terhadap Kebijakan dan Transformasi Sosial

Dinamika identitas kewarganegaraan di era globalisasi membawa implikasi serius terhadap arah kebijakan nasional dan transformasi sosial yang sedang berlangsung. Negara tidak boleh abai terhadap perubahan-perubahan ini, melainkan harus menjadi fasilitator dan katalisator dalam membangun identitas nasional yang kuat, adaptif, dan inklusif. Kebijakan pendidikan, budaya, dan komunikasi publik perlu diarahkan untuk memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.

Dalam jangka panjang, pembangunan identitas kewarganegaraan yang berakar pada Pancasila akan menciptakan masyarakat yang lebih toleran, terbuka, dan tangguh menghadapi tantangan global. Hal ini sekaligus akan memperkuat kohesi sosial, memperkecil potensi konflik identitas, dan meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional..

IV. KESIMPULAN

Rekonstruksi identitas kewarganegaraan Indonesia di era globalisasi merupakan kebutuhan yang mendesak. Arus globalisasi menuntut bangsa Indonesia untuk mempertahankn nilai-nilai kebangsaannya sekaligus beradaptasi dengan perkembangan global. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui revitalisasi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan pembangunan identitas adaptif yang tetap berpijak pada budaya lokal.

Saran:

1. Pemerintah perlu mengintegrasikan isu-isu global ke dalam pendidikan kewarganegaraan secara kontekstual.
2. Masyarakat dan lembaga pendidikan harus memperkuat penghayatan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Perlu ada kolaborasi antara negara, akademisi, dan generasi muda dalam merumuskan identitas nasional yang relevan dengan zaman.

DAFTAR REFERENSI

Castells, Manuel. (2010). *The Power of Identity*. Wiley-Blackwell.

Haryanto, S. (2018). *Globalisasi dan Tantangan Identitas Bangsa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.

Wahab, Abdul & Lestari, Lies Amin. (1999).*Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.

Zakaria, F. (2008). *The Post-American World*. W.W. Norton & Company.